

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.1 Kondisi Geografis

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa dan ratusan pulau kecil-kecil dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,15 km². Terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang selatan.

Batas wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Flores

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Selat Lombok/ Provinsi Bali

Sebelah Timur : Selat Sape/ Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Luas pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49%) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat di kota Mataram pulau Lombok.

IV.2. Keadaan Demograf

1. Penduduk

Berdasarkan data penduduk Dana Alokasi Umum (DAU) 2013, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.630.302 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.244.721 jiwa dan perempuan sebanyak 2.385.581 jiwa, dengan rasio

jenis kelamin sebesar 94.10%. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki kecamatan terbanyak yaitu 24. Sedangkan Lombok timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan.

Jumlah kecamatan di pulau Sumbawa sebanyak 63 kecamatan, lebih banyak dari pulau Lombok sebanyak 54 kecamatan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan berbanding terbalik dengan jumlah seluruh kecamatan di pulau Sumbawa. Jumlah seluruh desa/kelurahan di pulau Lombok ada 598 desa/kelurahan lebih banyak dari pulau Sumbawa sebanyak 548 desa/kelurahan.

b. Kegiatan Politik

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2013 sebanyak 3.478.441 pemilih yang terdiri dari 1.691.563 jiwa laki-laki dan 1.787.329 jiwa perempuan.

Tabel 4.1

Jumlah Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat 2013

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Lombok Barat	224.832	231.379	456.211
Lombok Tengah	338.116	361.833	699.949
Lombok Timur	416.233	451.849	868.082
Sumbawa	159.771	166.109	325.880
Dompu	73.295	75.967	149.262
Bima	163.093	168.531	331.624
Sumbawa Barat	45.057	47.346	92.403
Lombok Utara	76.750	78.718	155.468
Kota Mataram	143.521	151.558	295.079
Kota Bima	50.651	53.832	104.483
Jumlah	1.691.319	1.787.122	3.478.441

Sumber: NTB dalam Angka 2014

IV.3 Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2013/2014 jumlah murid yang bersekolah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebanyak 972.706 orang, terdiri dari 842.130 murid sekolah negeri dan 148.576 murid sekolah swasta. Jumlah terbanyak, sebesar 540.246 merupakan murid sekolah dasar, Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah

Dasar Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013/2014 dengan tertinggi di Kabupaten Dompu yang mencapai 121.23.

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dan mental, terdapat 29 Sekolah Luar Biasa, dan 490 orang guru atau tenaga pengajar yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Pada tahun 2013 terdapat penambahan satu buah rumah sakit swasta. Terdapat 157 unit puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Peningkatan fasilitas juga dibarengi dengan peningkatan tenaga kesehatan. Hingga tahun 2013 jumlah tenaga kesehatan mencapai 10.536 orang. Ada peningkatan jumlah dokter spesialis dari 119 dokter spesialis tahun 2012 naik menjadi 179 dokter spesialis tahun 2013.

3. Agama

Mengikuti perkembangan jumlah penduduk, maka jumlah fasilitas ibadah di Nusa Tenggara Barat juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah masjid di NTB telah mencapai 5.288 buah dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Lombok Tengah.

4. Gambaran Masyarakat Islam di Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tiga etnis asli yaitu etnis Sasak yang mayoritas berdomisi di Lombok serta etnis Sumbawa dan Mbojo yang umumnya berdomisili di Sumbawa. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Muslim tercatat 4.599.892 sementara itu basis sosial Islam sangat kuat di kawasan Lombok dan Sumbawa. Hal ini berkaitan dengan sejarah masuk Islam di NTB yang bersumber dari dua jalur yakni dari barat (Jawa) dan dari timur (Goa). Pengislaman pulau Lombok terjadi di bawah pemerintahan Sunan Prapen, putra susuhunan Ratu Giri yang pernah menaklukkan kerajaan Sumbawa dan Bima. Sedangkan Islam masuk ke Sumbawa dan Bima melalui misi Sultan Gowa yang mengirim sejumlah da'i. baik di Lombok maupun Sumbawa Islam masuk lewat jalur dakwah, perdagangan dan juga melalui perkawinan

Pola hubungan antar agama di Nusa Tenggara Barat tidaklah terlalu fluktuatif. Kecenderungan saling menghargai dan kesediaan hidup berdampingan secara damai antar pemeluk merupakan ciri umum. Meskipun demikian, tidak berarti sepenuhnya berjala mulus. Beberapa kali antar umat Islam dengan pemeluk agama lain terlibat konflik, khususnya apabila isu yang mengemuka sudah memasuki segi-segi sensitif dalam hubungan antar agama.

Nusa Tenggara Barat yang mayoritas masyarakat beragama Islam dengan kondisi masyarakat yang begitu homogen sangat rentan dengan gesekan budaya yang datang dari luar, karena masyarakat Lombok sangat tergantung dengan sosok Tuan Guru. Bagi masyarakat Muslim Lombok Tuan Guru adalah ulama yang sangat

kharismatik dikarenakan ilmu agama yang dimiliki, serta mengajar ilmu agama dan ilmu umum di madrasah atau pondok pesantren. Oleh karena itu, bagi masyarakat NTB adanya aliran kelompok baru seperti Ahmadiyah membuat masyarakat NTB merasa terganggu dan keberadaan mereka telah mencederai para Tuan Guru bahkan telah dianggap menodai Islam di NTB khususnya di Lombok (Putrawan, 2015).

Kebiasaan atau ritual-ritual agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga memicu terjadinya konflik antara Ahmadiyah dan umat Islam di Lombok. Konflik antara Ahmadiyah dan masyarakat NTB terjadi di dusun ketapang, desa gegerung, kecamatan lingsar Lombok barat penyerangan dan pengrusakan dilakukan terhadap 33KK komunitas Ahmadiyah pada tanggal 19 oktober 2005 dan di desa Prapen kecamatan Praya Lombok tengah pada tanggal 17 maret 2006. (Sholihin, 2014:45).

IV.4 Deskripsi Organisasi Nahdlatul Wathan

1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Wathan

Berdirinya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat terutama dalam pendidikan waktu itu. Pendidikan di pulau Lombok pada saat itu masih sangat terbelakang karena adanya tekanan dari pemerintah colonial Belanda yang melarang berdirinya lembaga pendidikan atau organisasi sosial keagamaan dan lamanya kerajaan Hindu Bali yang bercokol di pulau Lombok.

Sebelum berdirinya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) telah didirikan tiga lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi ini yaitu, pesantren al mujahidin, madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yaitu madrasah yang khusus bagi laki laki, dan madrasah Nahdtul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang khusus bagi wanita.

Sesudah melihat perkembangan dan pertumbuhan pesat NWDI dan NBDI dan berdirinya beberapa cabang madrasah tersebut di luar daerah dan kota, maka TGH Zainuddin Abdul Majdi melihat adanya kebutuhan yang lebih kompleks, untuk mengontrol kedua lembaga pendidikan tersebut, beliau merasa butuh untuk mendirikan sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, Pembina, pemelihara dan penanggung jawab terhadap segala amal usaha yang dilakukan baik, dalam bidang pendidikan maupun sosial dan dakwah.

Pada tanggal 1 maret tahun 1953 TGH Zinuddin Abd Majdi akhirnya berinisiatif mendirikan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dinamakan Nahdlatul wathan (NW). Nama organisasi Nahdlatul wathan ini di ambil dari dua kata Arab yaitu Nahdlah dan Wathan, Nahdlah artinya kebangkitan, pergerakan sedangkan Wathan artinya tanah air dan Negara. Dengan demikian menurut pengertian bahasa Nahdlatul wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan Negara atau membangun Negara. Sedangkan secara istilah Nahdlatul wathan adalah organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunah wal jama'ah 'ala Mazhabil Imamisy Syafi'i memusatkan kegiatannya pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah.

2. Visi dan Misi Nahdlatul wathan

Visi organisasi Nahdlatul wathan adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dalam rangka memperoleh Ridha Allah di dunia dan di akhirat berdasarkan pada pokoknya NW, pokok NW iman dan taqwa. Sedangkan misi organisasi adalah penyelenggaraan pendidikan, kegiatan sosial, dan dakwah Islamiyah.

3. Aqidah, Asas dan Tujuan Nahdlatul Wathan

Organisasi Nahdlatul Wathan menganut faham Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah 'Ala Mazhabi Al-Imam Asyasyafi'i r.a. dan berasaskan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Sejak awal berdirinya, organisasi berasaskan Islam dan kekeluargaan. Asasnya berlaku hingga muktamar ke-3, dan kemudian diganti dengan Islam Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah 'Ala Madzhib Al-Imam Al-Syafi'i. perubahan ini terjadi mengingat khittah perjuangan kedua Madrasah induk, NWDI dan NBDI.

Sebagai organisasi keagamaan, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang Nahdlatul Wathan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui Pondok Pesantren, Diniyah, Madrasah/Sekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, kursus-kursus, serta meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

2. Menyelenggarakan kegiatan sosial seperti menyelenggarakan Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Rubath/Pondok/Asrama Pelajar/Mahasiswa, Pos Kesehatan Pondok Pesantren (POSKESTREN), balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), klinik keluarga sejahtera dan rumah sakit.
3. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah melalui pengajian (majelis dakwah/majelis ta'lim) tabligh, penerbitan, mengembangkan pusat informasi Pondok Pesantren dan media lainnya.
4. Memelihara ukhuwah Islamiyah dan perdamaian dalam masyarakat
5. Menghidupsuburkan masyarakat tolong menolong, mempertinggi amal sosial dan amal jariah.
6. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak merugikan Nahdlatul Wathan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Wathan diatas, terlihat bahwa organisasi bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. (Fauzan, 2002:25-32).

IV.5. Dualisme Kepemimpinan di Tubuh Nahdlatul Wathan

Wafatnya TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid (Maulana Syeh) pada tahun 1997 menjadi awal terjadinya konflik interbal dan perebutan kekuasaan di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan. Pasca meninggal posisi Maulana syeh sebagai pemimpin NW dan umat islam diperebutkan oleh kedua putri beliau yaitu siti

Rahun (R1) dan Siti Raihanun (R2) yang lahir dari ibu yang berbeda karena Maulana Syeh menganut poligami. Adanya sikap diskriminatif dari elit-elit NW dalam memperlakukan kedua putri beliau juga menjadi penyebab munculnya konflik dan perpecahan.

Muktamar Nahdlatul Wathan ke-10 tahun 1998 di Praya Lombok Tengah, menjadi puncak terjadinya konflik dan munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh NW. Acara muktamar yang berlangsung pada tanggal 24-26 Juli 1998 tersebut diwarnai dengan persaingan dan pertarungan elit dari masing-masing kubu. Adapun jumlah peserta yang mempunyai hak suara dalam pemilihan calon ketua umum sebanyak 92 orang.

Pemilihan calon ketua umum NW dilaksanakan melalui dua tahap, pertama tahap penjaringan bakal calon dan yang kedua tahap pemilihan calon ketua umum. Seorang calon berhak maju ke tahap kedua jika memperoleh minimal 18 suara dari 92 suara. Dari hasil tahap pertama, terdapat dua nama yang muncul sebagai calon ketua umum, yaitu Raihanun dari kubu R2 dan Ma'sun Ahmad dari kubu R1. Raihanun memperoleh 54 suara dan Ahmad memperoleh 34 suara, 1 absen, 1 batal dan 2 orang tidak ikut memilih. Munculnya Raihanun pada tahap pertama tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh kubu R1, sebab selama ini Raihanun hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga. Kemenangan Raihanun membuat kubu R1 menjadi gelisah, karena hanya Rahun yang dapat menyaingi Raihanun, namun ia terlanjur tidak mencalonkan diri.

Pada tahap kedua, Ma'sun Ahmad mengundurkan diri dari kubu R1 sebagai calon ketua umum NW dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap hasil

Muktamar. Adanya perbedaan pendapat terkait dengan tafsir kepemimpinan perempuan antara Ma'sun Ahmad dan Dewan Syuro PB NW yang notebennya adalah pendukung R2 menjadi penyebab Ma'sun mengundurkan diri. Ma'sun Ahmad berpendapat bahwa Mahzab Syafi'I sebagai mahzab tunggal organisasi tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin, termasuk pemimpin dalam organisasi. Sedangkan dewan Syuro PB NW berpendapat sebaliknya, yang tidak diperbolehkan bagi perempuan ialah memimpin pada kasus-kasus tertentu seperti menjadi kepala Negara, imam shalat bagi laki-laki dan menjadi hakim pidana. Dengan pendapat demikian Ma'sun Ahmad dan pendukungnya memilih walk out dari arena muktamar, dan Raihanun (R2) dipilih secara aklamasi dan dilantik sebagai ketua umum PB NW untuk masa jabatan 1998-2003.

Hasil muktamar melahirkan pro dan kontra dikalangan jamaah NW, dimana kubu R1 menolak hasil muktamar karena dinilai melanggar aturan organisasi yang menganut mahzab syafi'I, sedangkan kubu R2 menganggap kepengurusan mereka telah sah dan tidak melanggar mahzab organisasi. Kubu yang kontra atau R1 kemudian mengadakan muktamar reformasi yang di motori oleh Ma'sun Ahmad dan Siti Rahun pada tanggal 11-12 September 1999 di Pancor Lombok Timur. Langkah ini merupakan satu langkah yang diambil untuk membuat pengurus Nahdlatul Wathan tandingan. Yang kemudian menetapkan TGB. Zainul Majdi sebagai ketua umum PBNW (tandingan). Kedua kubu kemudian aktif mensosialisasikan hasil muktamar melalui pengajian disetiap desa-desa yang menjadi basis pendukung mereka. Proses produksi dan reproduksi wacana dikonstruksi dan diproduksi melalui media agama yaitu pengajian. Wacana agama

berfungsi sebagai pendukung dan penguat wacana kekuasaan yang diproduksi oleh masing-masing kubu. Apa yang dikatakan dan diwacanakan oleh masing-masing elit NW menjadi “kebenaran mutlak” yang diterima begitu saja oleh jamaah NW.

Perang wacana yang terjadi antara kedua kubu pasca muktamar berubah menjadi praktik konflik. Konflik pertama kali terjadi di Pancor tahun 1998 ketika pendukung R1 memboikot jalan dan tidak mengizinkan kubu R2 untuk masuk ke wilayah Pancor dan melakukan penyerangan ke tokoh-tokoh dari kubu R2. Rumah dan bangunan-bangunan milik tokoh R2 dijadikan sasaran serangan oleh pendukung R1 yang kecewa dengan sikap mereka yang tidak netral dengan putri Mualana Syeh. Serangan demi serangan terus dilakukan kubu R1 yang diakhiri dengan hijrahnya kubu R2 dan pendukungnya dari Pancor ke desa Kalijaga dan kemudian ke desa Anjani. Dengan terbentuknya Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hasil muktamar reformasi maka secara de-facto organisasi NW memiliki dua kepemimpinan yaitu pengurus besar hasil muktamar ke-10 yang diketuai oleh Siti Raihanun (anak pendiri NW) dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan hasil reformasi yang diketuai oleh TGB.KH. Zainul Majdi, MA (cucu pendiri NW).

Dengan adanya dua pemimpin ini maka permasalahan yang timbul adalah terjadinya upaya saling rebut amal usaha atau asset NW yang ada di cabang-cabang dan terjadinya upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan dari warga NW. Untuk menjaga asset NW maka terbentuklah barisan keamanan. Kubu Pancor (R1) membentuk satgas Hamzanwadi dan kubu Anjani (R2) membentuk barisan Hizbullah Nahdlatul Wathan. Salah satu tugas dari satuan ini adalah bergerak dalam bidang keamanan. Dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas organisasi, pihak

Pancor didampingi oleh satgas Hamzanwadi dan kubu Anjani di damping oleh Hizbullah Nahdlatul Wathan.

Fakta yang kemudian terjadi di lapangan adalah ada beberapa asset NW seperti lembaga pendidikan NW yang dikuasai oleh orang-orang Hamzanwadi dan dan dikuasai oleh orang-orang Hizbullah. Namun ada juga yang dikuasai oleh kedua belah pihak. Penguasaan oleh kedua belah pihak inilah yang sering membuat terjadinya konflik. Akibat perebutan kekuasaan antara kedua kubu ini terjadi beberapa tragedi yang membuat konflik semakin rumit, seperti konflik yang terjadi di desa Kesik, Kelayu, Wanasaba dan Paok Lombok. (Fahrurrozi, 2011:70-72).

Konflik Nahdlatul Wathan terus menyebar bahkan sampai ke ranah politik. Kedua kubu terus bersaing dan membangun afiliasi politik masing-masing. Hal ini terlihat dari pemilu 1999 dimana kubu R1 bergabung dengan PDR dan kubu R2 bergabung dengan partai Golkar. Tak hanya itu, pada tahun 2004 kedua kubu berganti berndera politiknya dimana R1 bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan R2 bergabung dengan Partai Bintang Reformasi (PBR). Dan pada pemilu 2014, kubu R1 dan R2 kembali merubah haluan politiknya yaitu dengan R1 berafiliasi bersama Partai Demokrat dan R2 dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sampai saat ini, Nahdlatul Wathan masih terpecah kedalam dua kubu, yaitu kubu Rauhun dan kubu Raihanun. Upaya-upaya untuk mempersatukan kedua kubu selalu mengalami kegagalan. Akan tetapi pada tahun 2010 kedua kubu sepakat untuk berdamai. Perdamaian itu dianggap syarat dengan kepentingan-kepentingan politik karena pada saat itu putra Raihanun atau R2 Lalu Gede Sakti mencalonkan

diri sebagai calon Bupati Lombok Tengah periode 2010-2015. Ia membutuhkan dukungan dari kedua kubu untuk dapat memenangkan pilkada. Pada putaran pertama, Gede Sakti menang dengan jumlah perolehan suara sebanyak 47.71% kemudian disusul dengan pasangan Maik Meres sebanyak 21.83%, Jari 19.94% dan Suke 19.33% suara. Berbagai cara dilakukan untuk memenangkan Lalu Gede salah satunya dengan mengajak Tuan Guru Bajang ikut berkampanye sebagai bukti dari perdamaian Nahdlatul Wathan. Kedua kubu saling bekerja sama untuk memenangkan Lalu Gede tapi pada putaran kedua semuanya berbalik Lalu Gede mengalami kekalahan dengan jumlah perolehan suara 40% sedangkan lawan politiknya Maik meres memperoleh 59.3% suara. Kekalahan Lalu Gede ini kemudian berdampak pada proses rekonsiliasi yang mengakibatkan gagalnya perdamaian dari kedua kubu dan sekarang tetap menjalankan organisasi masing-masing.

IV.6 Politik Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013

Lombok, salah satu pulau besar di Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah penduduk terpadat, kiprah ulama kharismatis, seperti TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid sangat menonjol dalam perpolitikan. Saat pemilu 1955 berlangsung, beliau telah terlibat dalam memenangkan Masyumi di Nusa Tenggara Barat. Begitupun dalam periode selanjutnya, dengan berbaju politik Golkar, Tuan Guru berperan dalam kesuksesan Golkar di wilayah yang amat kental dengan ciri keIslaman ini. Setelah beliau wafat, para keturunan dan pengikutnya tetap mewarisi kiprah Tuan Guru dalam perpolitikan. Jika dilihat dari perpolitikan yang terjadi di NTB tahun 2008 merupakan awal dari berubahnya peta politik NTB. Nusa

Tenggara Barat yang merupakan basis Golkar untuk wilayah bagian timur kini beralih kepada partai Demokrat dan partai berbasis Islam (Linayati:2011).

Tahun 2008 merupakan ujung tombak dari perubahan peta politik NTB, dari yang mula partai berlambang pohon beringin dan figur calon berasal dari birokrat kini berubah menjadi partai bernuansa Islam dan calon yang berasal dari kalangan kiai (Tuan Guru). Hal serupapun masih terjadi pada pilkada 2013 lalu, yaitu keterlibatan kiai dan partai Islam masih sangat tinggi dalam perpolitikan NTB. Ini dapat dilihat dari dua pasangan calon Gubernur yang mencalonkan diri berasal dari kalangan Tuan Guru yaitu pasangan urut satu (TGB) dan empat (Zulkifli).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan pada tahun 2013 diikuti oleh 4 (empat) Pasangaan calon Gubernur dan wakil Gubernur. Adapun kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada waktu itu: nomer urut satu TGB. Dr. H. Zainul Majdi dan H. Moh. Amin; nomer urut dua Suryadi Jaya Purnama ST dan Johan Rosihan; pasangan nomer urut tiga Drs. Harun Al Rasyid dan H. Lalu Abdul Huhyi Abidin MA; dan pasangan urut terakhir yaitu Dr. KH Zulkifli Muhadly dan MM-Prof. Dr. Ir. H. M. Icsan, MSi.

Dua dari empat pasangan calon kepala daerah yaitu nomer urut satu dan nomer urut empat adalah tokoh agama (kiai/Tuan Guru) dan keduanya menapaki karier politik dengan bendera Partai Bulan Bintang (PBB), dimana kedua tokoh ini mempunyai basis massa yang besar di wilayah masing-masing yaitu Tuan Guru Bajang di Pulau Lombok dan KH. Zulkifly di Pulau Sumbawa. Pasangan nomer urut satu adalah mantan Gubernur terpilih sebelumnya yang didukung tujuh partai

(Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP, Gerindra dan PKB) dan satu kekuatan besar yaitu organisasi keagamaan terbesar di Nusa Tenggara Barat yang bernama Nahdlatul Wathan Pancor. Organisasi NW merupakan modal dasar (*basic capital*) pencalonan TGB menjadi Gubernur karena TGB didukung oleh para tokoh NW di seluruh NTB khususnya tokoh-tokoh di pulau Lombok.

Sedangkan pasangan nomer urut empat mempunyai basis massa khususnya di Kabupaten Sumbawa yang sudah mempunyai nama dikalangan masyarakat karena gelar Tuan Guru yang diembanya dan juga menjabat sebagai Bupati Sumbawa Barat selama dua kali berturut-turut. Disamping itu juga pasangan ini mempunyai posisi yang sangat kuat karena memperoleh dukungan dari kader NW Anjani yang merupakan setengah dari mayoritas warga NW.

Sementara Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihan nomer urut dua yang merupakan pasangan baru mempunyai basis masa yang cukup besar terutama di Lombok Barat sehingga menjadi tantangan bagi pasangan lain untuk bisa memasuki wilayah peta politik basis pendukung nomer urut dua. Disamping itu pengalaman politik yang dimiliki oleh Suryadi sebagai mantan tim sukses kemenangan TGB tahun 2008 tidak dapat dipungkiri menjadi senjata bagi pasangan ini karena telah mengenal bagaimana karakter masyarakat dalam berpolitik. Begitu pula pasangan nomer urut tiga yang mempunyai basis besar di Kota Mataram dan Kota Bima. Drs. Harun Al Rasyid adalah mantan Gubernur NTB jauh sebelum TGB mencalonkan diri. Jadi secara politik maupun pemerintahan daerah, Drs. Harun Al-Rasyid sudah terkenal dan dekat dengan masyarakat NTB karena banyak program-program

unggulan yang berhasil dijalankan pada masa kepemimpinannya dulu di Nusa Tenggara Barat.

Dari berbagai latar belakang dan keutamaan calon kandidat kepala daerah tersebut hasilnya pun cukup memberi kejutan. Dimana posisi pertama dan kedua suara terbanyak pada pilkada NTB 2013 dimenangkan oleh kedua calon pasangan yang berasal dari tokoh agama (Tuan Guru). Dengan perolehan suara tertinggi yang didapatkan oleh kedua tokoh agama tersebut, hal ini membuktikan bahwa NW sudah mengakar di NTB dan juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih sangat *fanatic* terhadap Tuan Guru

Tabel 4.2

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi
Nusa Tenggara Barat Periode 2013-2018

No.Urut	Nama Calon		Perolehan Suara	
	Gubernur	Wakil Gubernur	Angka	Presentase
1	TGB Dr. H. M. Zainul Madji, MA	H. Moh. Amin SH,MSi	1.038.638	44.36%
2	Suryadi Jaya Purnama, ST	Johan Rosihan, ST	183.823	7.85%
3	Drs. Harun Al Rasyid, M.Si	H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA	498.420	21.50%
4	Dr. KH. Zulkifli Muhadly, SH	MM-Prof. Dr.Ir H. M. Ichsan, M.Si	620.611	26.50%

Sumber: KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah suara yang di dapatkan oleh TGB-Amin jika dibandingkan dengan pasangan lain jauh berbeda selisih suara yang didapatkan sekitar 15 persen lebih, dengan hanya satu putaran. Pasangan TGB-Amin menang hampir di seluruh kabupaten yang ada di Lombok terutama di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi penyumbang suara terbanyak dan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan basis dari organisasi NW, dengan melihat hasil perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan TGB-Amin maka dapat dikatakan strategi kemenangan politik yang dijalankan tim sukses dari Partai Politik, TGB *center* dan Nahdlatul Wathan lebih intensif ketimbang pasangan calon kepala daerah lain.

IV.7 Tuan Guru Bajang (TGB) *Center*

TGB *center* adalah lembaga non formal yang didirikan oleh Tuan Guru Bajang menjelang dihelatnya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah sebagai salah satu modal politik Tuan Guru bajang dalam rangka menghadapi percaturan politik pemilihan Gubernur tahun 2008 dan 2013 lalu. Elemen-elemen yang tergabung dalam TGB *center* adalah orang-orang diluar partai, komunitas masyarakat muslim dan non-muslim, pelajar dan lain-lain yang ada di Nusa Tenggara Barat.

TGB *center* dijadikan sebagai mata (melihat) dan telinga (mendengar) Tuan Guru Bajang untuk melihat bagaimana demokrasi di Nusa Tenggara Barat dan bagaimana kondisi masyarakat. Kantor TGB *center* berada di Kota Mataram, anggota TGB *center* tidak tetap, tim sukses kemenangan TGB pada saat pilkada di

bentuk secara non formal dengan menempatkan setiap wakil-wakil direktornya di setiap Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Setelah perhelatan demokrasi (pilkada) selesai maka tim TGB *center* di bubarkan.